

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori**

##### **2.1.1 Administrasi Pembangunan**

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Sahya Anggara dan Li Sumantri 2016,24) administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administarsi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Tjokroamojojo (dalam Listiyaningsih 2014, 18) administrasi pembangunan diartikan sebagai suatu proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Sedangkan menurut George F. Gant (dalam Affifudin 2010, 22) menjelaskan bahwa administrasi pembangunan sebagai peyempurnaan birokrasi dalam menghadapi meningkatnya jumlah, jenis dan kompleksitas fungsi- fungsi pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan

Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah “bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya bersifat infrastuktur dan prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan dibidang sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Adapun pembangunan fisik tersebut meliputi sarana dan prasarana pemerintahan, seperti Jalan, Jembatan, Pasar, dan Irigasi,

Dalam pembangunan suatu wilayah tidak hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan non fisik berkaitan dengan sumber daya manusia, yaitu pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan non fisik mengedepankan sumber daya manusia, karena dengan adanya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik.

Pengertian administrasi pembangunan diatas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini proses pembangunan dapat diupayakan kearah yang positif serta lebih maju dari sebelumnya. Suatu pembangunan perlu usaha yang dapat dilakukan secara sadar, pengorbanan dan proses yang memakan waktu serta harus dilalui dengan kerjasama semua pihak yang terlibat.

Afiffudin (2010, 64) fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu aadministrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain yaitu :

- a. Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik.
- b. Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi sikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Katzs (dalam M. Safi'i 2009, 8) mengartikan pembangunan sebagai perubahan yang lebih luas dari masyarakat terhadap suatu keadaan kehidupan yang kurang bernilai kepada keadaan yang lebih bernilai.

Bryan White (dalam M. Safi'i 2009, 8) mengartikan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Dalam hal ini terdapat lima implikasi utama dari definisi pembangunan, yakni :

- a. Kapasitas, Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.

- b. Keadilan, Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan.
- c. Pemberdayaan, Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan yang memutuskan.
- d. Keberlanjutan, Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.
- e. Saling Ketergantungan, Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Sehingga dengan adanya suatu pembangunan dapat menciptakan kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur dan sebagainya.

### **2.1.2 Pariwisata**

Secara etimologis kata pariwisata berasal dari bahasa sansakerta yang terdiri atas dua suku kata yaitu “pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, dan keliling. Sedangkan kata “wisata” yang berarti perjalanan atau bepergian. Dengan demikian pengertian dari kata pariwisata berarti suatu perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ketempat yang lain.

Menurut definisi yang luas seperti yang dikatakan oleh Spillane (1985:5) pariwisata adalah “perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu”.

Marpaung (2002), menyatakan pariwisata sebagai perpindahan sementara yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan rutinnnya atau juga tempat kediamannya.

Sedangkan menurut WTO (1991), yang dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya.

Menurut Soekadijo (2000) mengatakan bahwa sektor pariwisata adalah segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan.

Karena pariwisata terdiri atas berbagai kegiatan organisasi yang menyediakan barang dan jasa untuk wisatawan, seperti angkutan wisata, akomodasi, atraksi manusia dan daya tarik alam, jasa perseorangan serta jasa pemerintah, hal ini mengakibatkan sektor pariwisata sering disebut dengan industri pariwisata (Bull, 1991).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penting yang terdapat daam konsep pariwisata adalah adanya perjalanan yang dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok dari suatu tempat yang bukan merupakan tempat tinggalnya ke tempat yang lain yang sifatnya sementara dan bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dari berekreasi maupun untuk mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam sementara waktu, yang disebut destinasi pariwisata.

Dalam hal ini pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pembangunan berbagai

sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. Jadi dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu aset negara yang penting. Pariwisata bisa menjadi industri yang memajukan Indonesia, serta membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat. Pembangunan pariwisata adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana prasarana, daya tarik wisata dan segala aspek lainnya.

### **2.1.3 Peran**

Kata peran merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata itu tetapi belum paham arti dari kata tersebut. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Pemerintah adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dan hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen serta unit dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk peraturan atau pun pelayanan-

pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata dan sebagainya.

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan kepariwisataan tidak lepas dari peran serta pemerintah yang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

#### **2.1.4 Peranan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata**

Peranan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sangat mempengaruhi pembangunan objek wisata di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum karena tanpa peranan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pembangunan objek wisata di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum tidak akan dapat diwujudkan. Untuk mengembangkan objek wisata ada tiga indikator yakni motivator, fasilitator, dan dinamisator.

##### **1. Motivator**

Peran pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebagai motivator sangat diperlukan agar kepariwisataan itu dapat berjalan dan usaha pariwisata terus berjalan dengan lancar. Pemerintah desa dan masyarakat merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

##### **2. Fasilitator**

Peran pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebagai fasilitator yakni dalam memfasilitasi segala kebutuhan

kepariwisataan sehingga kepariwisataan dapat terwujud. Sebagai fasilitator pembangunan objek wisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Menurut Mudjarad Kuncoro (2014, 113-114) menyatakan peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata dapat mencakup sebagai berikut:

1. Wirausaha

Sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab menjalankan 'suatu usaha bisnis'. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah dan bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi serta perencanaan pembangunan atau tujuan lain yang dapat digunakan untuk tujuan yang bersifat ekonomi. Hal tersebut dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian sekitar.

2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan daerah. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha dan kelompok masyarakat lain.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerah. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

4. Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut. berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam bidang kepariwisata pemerintah daerah dapat mempromosikan tema dan kegiatan khusus objek wisata tertentu.

Davey (dalam Oka A. Yoeti. 1997. 57) memaparkan terdapat lima fungsi utama pemerintah :

1. Sebagai penyedia pelayanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan layanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakat.
2. Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan.

3. Fungsi pembangunan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
4. Fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka.
5. Fungsi koordinasi, yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tataguna lahan.

### 2.1.5 Indikator Peran

Menurut Pitana dan gayatri (2005, 95) ada 3 indikator peran penting untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah, yakni Motivator, Fasilitator, dan Dinamisator :

1. Motivator  
Peran pemerintah sebagai motivator diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
2. Fasilitator  
Sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Parwisata dan Kebudayaan daerah setempat. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
3. Dinamisator  
Dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan kegiatan pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

## 2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

1. Uray Esha Asley, 2021

Judul penelitian yang diteliti “Strategi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata (Studi Pada Objek Wisata Nusantara di Kabupaten Mempawah).

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

mengenai Strategi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Mempawah permasalahan mengenai pengembangan pariwisata di Kabupaten. Dalam pengelolaan objek wisata belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi yang ada di objek wisata tersebut. Sehingga perlu adanya strategi pengembangan objek pariwisata di Kabupaten Mempawah. Tujuan yang hendak dicapai adalah strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam mengembangkan potensi pariwisata berjalan dengan baik.

2. Isti Komah, 2020.

Judul penelitian yang diteliti “Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam Pembangunan Objek Wisata Lubuk Baji di Kabupaten Kayong Utara”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pelaksana, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pariwisata dalam pembangunan objek wisata Lubuk Baji di Kabupaten Kayong Utara. Karena objek wisata Lubuk Baji sangat banyak diminati oleh wisatawan dan peran pemerintah dalam mengikut sertakan masyarakat untuk mengembangkan objek wisata Lubuk Baji merupakan salah satu bentuk dari peran pemerintah sebagai penggerak untuk ikut berperan aktif bersama-sama dalam kegiatan pembangunan kawasan pariwisata

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Penelitian**

No.	Peneliti	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Uray Esha Asley 2021	Strategi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata (Studi Pada Objek Wisata Nusantara di Kabupaten Mempawah.	Metode Penelitian : Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Metode Penelitian : Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
			Tujuan Penelitian : Mengidentifikasi permasalahan dalam pengembangan pariwisata sebagai dasar dalam merumuskan strategi pemerintah daerah mengembangkan potensi pariwisata wisata nusantara di Kabupaten Mempawah.	Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam pembangunan objek wisata di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.
			Objek Penelitian : Strategi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam mengembangkan potensi Pariwisata Wisata Nusantara di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.	Objek Penelitian : adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam membangun objek wisata di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.
2.	Isti Komah 2020	Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam Pembangunan Objek Wisata Lubuk Baji di Kabupaten Kayong Utara.	Metode Penelitian : Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Metode Penelitian : Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
			Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui peran Dinas Pemuda Olahraga sebagai Pelaksana, Pelayanan, Pembinaan,	Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam pembangunan objek

			dan Pengendalian Urusan Pemerintah bidang Pariwisata.	wisata di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.
			Objek Penelitian : Peran Pemerintah dalam Pembangunan objek wisata Lubuk Baji yang ada di kawasan Kabupaten Kayong Utara. Karena kurangnya peran Pemerintah dalam mengoptimalkan pembangunan destinasi wisata di Kabupaten Kayong Utara karena hal itu perlu ditingkatkan lagi.	Objek Penelitian : adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam membangun objek wisata di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.

*Sumber: oleh peneliti, Tahun 2021*

### 2.3 Kerangka Pikir

Pariwisata merupakan keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik yang dapat dikunjungi oleh wisatawan sehingga dapat menciptakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, perdagangan jasa, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Objek wisata di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum merupakan suatu sektor yang bisa membuat suatu pergerakan dalam perekonomian masyarakat suatu daerah agar bisa lebih maju. Jika dilihat dari potensi yang ada objek wisata di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum memiliki peluang besar dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu apabila dirawat dan dikelola dengan baik oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam hal ini, potensi objek wisata di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu sudah sepantasnya menjadi desinasi wisata yang baru dan unggul di Kabupaten Kapuas Hulu. Namun, terdapat beberapa masalah yang patut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terutama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yaitu :

3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam memfasilitasi objek wisata di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.
4. Kurangnya promosi lebih lanjut.

Sesuai dengan pemaparan yang telah dikemukakan, maka penulis mengkaji masalah “Bagaimana peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam pembangunan objek wisata di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum?” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan lingkungan sekitar objek wisata di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas

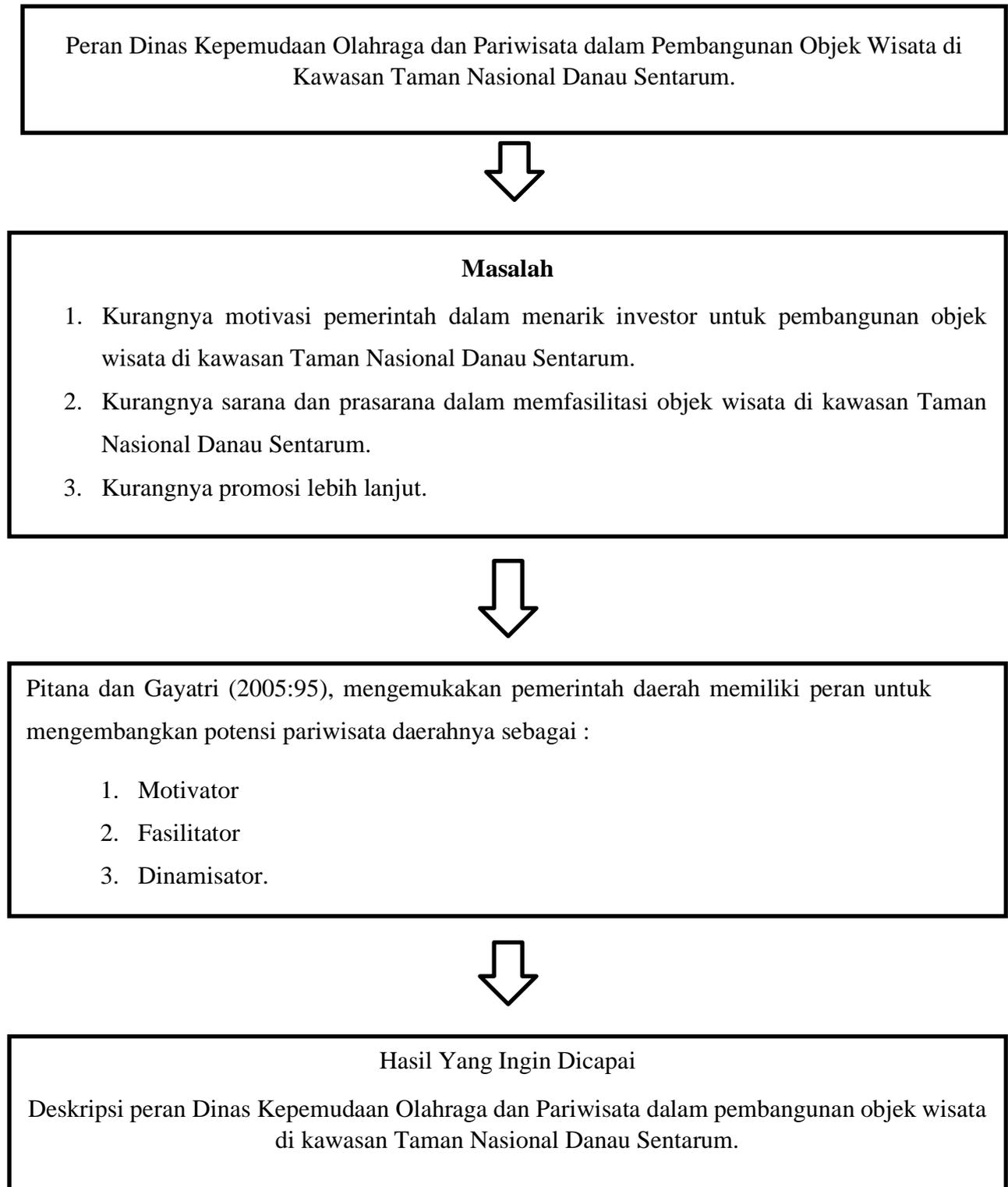
Hulu sebagai sumber data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung serta menggali sumber yang berkaitan dengan Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam Pembangunan Objek Wisata di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Kemudian Penulis akan menganalisis data dengan cara memperbanyak informasi, mencari hubungan dari berbagai sumber dan membandingkan hasil yang telah didapatkan.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori Pitana dan Gayatri (2005, 95) mengemukakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah sebagai

1. Motivator
2. Fasilitator
3. Dinamisator

Penulis akan menjadikan teori ini sebagai analisis dalam penulisan. Penulis berharap dapat menemukan solusi serta diharapkan dapat menghasilkan output dalam masalah peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam pembangunan objek wisata di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pikir**



## **2.4 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimanaperan DISPOPAR sebagai motivator untuk berpartisipasi dalam pembangunan Objek Wisata di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum?
2. Bagaimana peran DISPOPAR sebagai fasilitator masyarakat sekitar agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan Objek Wisata di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum?
3. Siapa saja yang berkerjasama dengan DISPOPAR dalam menyediakan fasilitas Objek Wisata di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum?